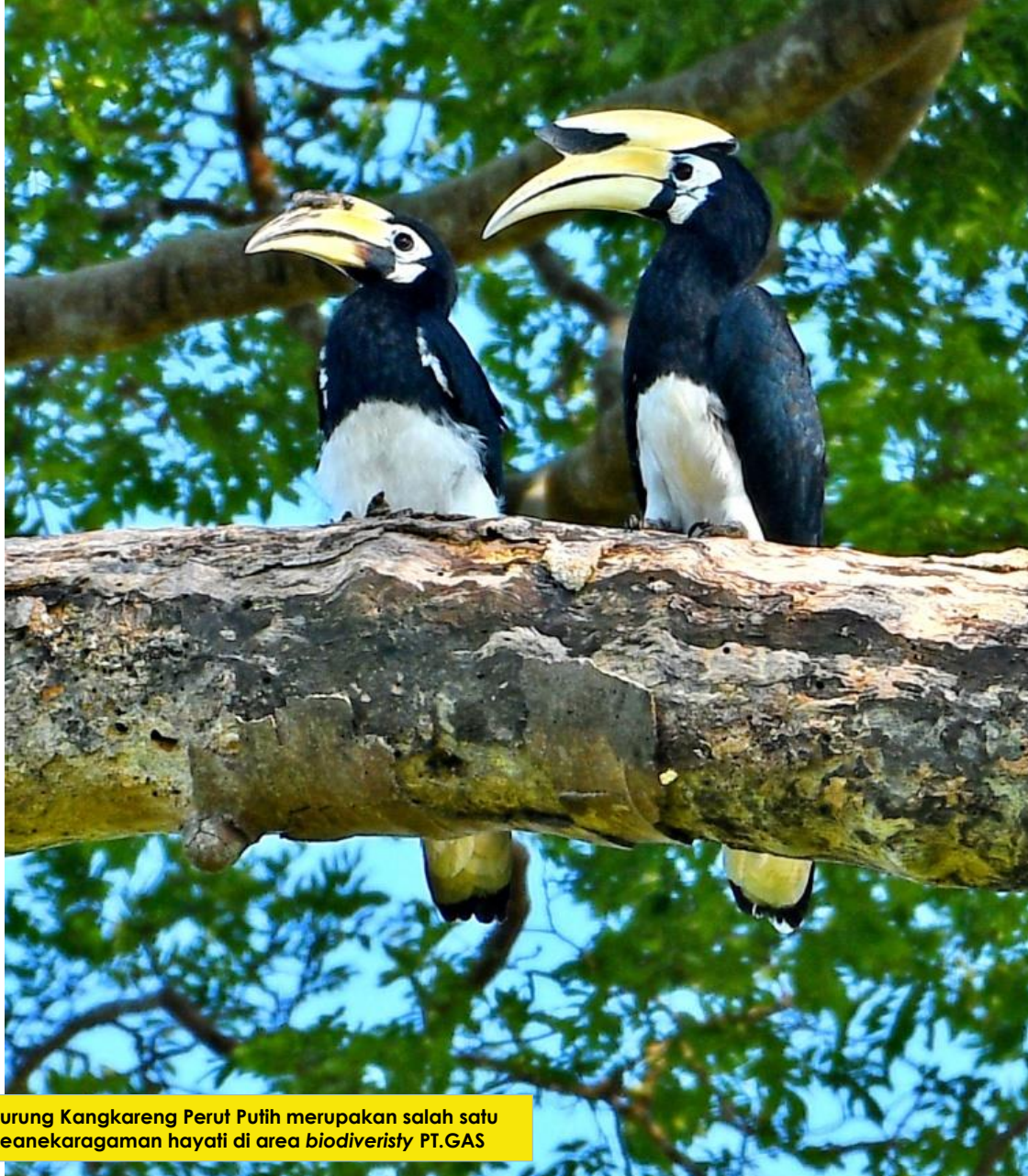


SUSTAINABILITY NEWS



Daftar Isi

Salam Redaksi	1
DMPA	2
Desa Muara Dua	3
Karhutla	5
Pencegahan Karhutla	6
Biodiesel	7
PojokPintar	8
Pojok Hukum	9
Program Replanting	10

Tim Redaksi

Penasehat	Sutedjo H
Pemimpin Umum	Rudy P
Pemimpin Redaksi	Fika A
Tim Redaksi	Dian N Edi S Agung S Sita T

Kontributor

Widiyanto
Batuwoka L
Arief H
Verrie S
Asdarusman

Burung Kangkareng Perut Putih merupakan salah satu keanekaragaman hayati di area biodiversity PT.GAS

“Pencegahan lebih mudah dan murah dibandingkan dengan tindakan pemadaman.”

Anonim

“Sustainability is not about choice, is about business to move forward”

Rudy Prasetya

“The Key To Understanding The Future is One Word: **SUSTAINABILITY**”

Patrick Dixon



@tap.agri



@tap.agri



@tap_agri

REDAKSI

Kepada Insan Triputra,

Selamat datang di E-Buletin SustainabilityNEWS edisi Perdana ini.

Dengan hadirnya Sustainable Development Goals (SDGs) secara Global, Management perusahaan merasa perlu menerbitkan buletin mengenai komitmen dan kontribusi perusahaan dalam mencapai minyak sawit berkelanjutan kepada seluruh jajarannya.

Hal ini dapat terlihat dari kegiatan *sustainability* yang perusahaan lakukan, yang juga merupakan upaya untuk mempercepat pencapaian SDGs.

E-Buletin yang terbit setiap dua bulan ini diharapkan dapat memberi manfaat dengan membagikan informasi, pengetahuan seputar *sustainability* dan kegiatannya kepada semua staf agar selalu ter-update dengan perkembangan yang ada.

Kami berharap mendapatkan masukan yang membangun dari seluruh Insan Triputra, dan jika ada yang ingin menjadi kontributor bisa mengirimkan artikel ke information@tap-agri.com

Salam kenal dan selamat membaca.

Tim TAP-REDaksi

SALAM KENAL

Kepada Insan Triputra,

Seperti yang kita telah ketahui, kelapa sawit merupakan komoditas ekspor utama Indonesia. Selain itu juga memiliki nilai strategis terhadap Negara dalam hal pemerataan pembangunan dan pengetasan kemiskinan, dengan kata lain industri perkebunan kelapa sawit merupakan sektor yang paling memenuhi kriteria Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Penting bagi pemerintah Indonesia saat ini untuk melaksanakan SDGs agar tercapainya pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan supaya mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Agar dapat tercapainya hal tersebut, maka pemerintah membutuhkan keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, Triputra Agro Persada (TAP Group) ingin berkontribusi untuk membantu pencapaian target SDGs di tahun 2030. Hal ini juga sejalan dengan komitmen TAP dalam menjalankan prinsip keberlanjutan untuk menghasilkan minyak sawit yang lestari, dan visi Perusahaan yaitu "Excellent Plantation for The World," maka secara bertahap perusahaan selalu menunjukkan kesungguhannya dalam menerapkan praktek-praktek terbaik dalam setiap kegiatan bisnisnya.

Di tahun 2015 lalu, dengan diadakannya Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat, telah melahirkan era yang baru, yaitu SDGs. Sidang yang dihadiri dan disepakati oleh 193 kepala Negara dan pemerintahan dunia menghasilkan dokumen pembangunan baru mengenai Agenda SDGs yang berlaku hingga tahun 2030.

Pada era ini tidak hanya memfokuskan pada kemiskinan (Poverty) saja, namun akan lebih jauh lagi pada masyarakat (People), bumi (Planet), kemakmuran (Prosperity), kedamaian (Peace) dan kemitraan (Partnership). Kelima fokus ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim di tahun 2030. Untuk mencapai tiga hal tersebut, maka disusunlah 17 Tujuan SDGs dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan, dan saling terintegrasi satu sama lain.

Dengan komitmen keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan ini dapat menunjukkan kepada seluruh staf TAP Group dan masyarakat luar bahwa perusahaan peduli dengan kesejahteraan hidup masyarakat, perlindungan lingkungan dan kinerja perusahaan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian dan dukungan dari Insan Triputra bagi keberlanjutan perusahaan selama ini.

Salam Keberlanjutan.
Tim TAP-REDaksi



PEDULI API

Tahun ini TAP Group menginisiasikan program baru dengan nama program **Desa Makmur Peduli Api (DMPA)**. Program berkelanjutan ini adalah perpaduan dari program **Desa Bebas Kebakaran (DBK)** yang selama ini sudah berjalan, dengan program **Pemberdayaan Ekonomi Desa** yang sejak pertengahan tahun ini *Pilot Project*-nya sedang dilaksanakan di PT. GBSM. Program Pemberdayaan Ekonomi Desa ini sendiri memfokuskan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi dan pemberian pendampingan untuk semua desa yang berada di sekitar perusahaan. Dengan adanya program ini, diharapkan 3 pilar penting dalam program keberlanjutan yaitu Masyarakat, Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Bagaimanakah cara bekerjanya?

Jadi, tiap-tiap desa yang menjadi pemangku kepentingan utama perusahaan akan diberikan **Asisten Pendamping Desa** yang bertanggung jawab langsung kepada Estate Manager atau General Manager Area. Para Asisten ini akan memastikan desa-desa di sekitar perusahaan tumbuh berkembang melalui usaha ekonomi dan tata kelola lingkungan yang baik. Mereka akan memberikan pengarahan, bimbingan hingga pembinaan melalui kelembagaan, dari mulai Kelompok Tani, Kelompok Usaha sampai pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendamping desa ini juga akan memfasilitasi desa dengan

pihak lain untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih besar.

Selain itu, program pencegahan Karhutla yang selama ini berjalan dengan DBK-nya pun juga menjadi bagian dari tugas para pendamping desa ini. Mereka akan melakukan sosialisasi, pendampingan dan mengajak partisipasi segenap pemangku kepentingan untuk menciptakan budaya pengelolaan lahan tanpa membakar.

Program ini akan dijalankan secara bertahap di seluruh TAP Group yang berada di pulau Sumatera dan Kalimantan.

ASISTEN PENDAMPING DESA

Asisten Pendamping Desa (APD) adalah seorang fasilitator, pembina, penyuluh, dan pelaksana program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan lingkungan di desa-desa.

Fokus utama:

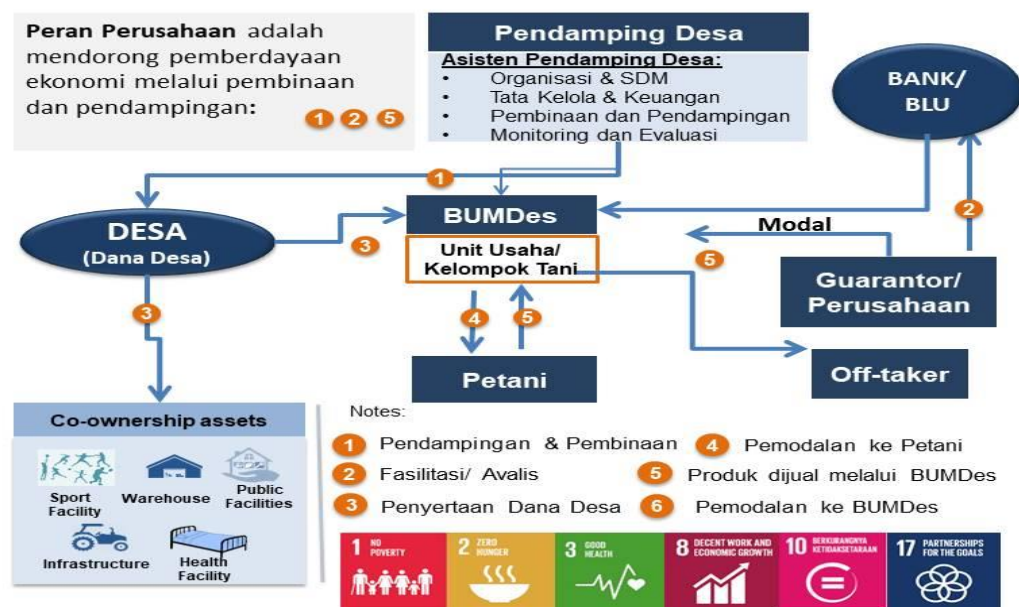
- Pemberdayaan Ekonomi.
- Program Desa Bebas Kebakaran.



49 Desa yang akan di dampingi
13 Asisten Pendamping Desa



Model Ekonomi - Kemitraan Desa



Untuk tahun ini, sudah ada 3 Asisten Pendamping Desa yang berada di PT. GBSM, PT. HPM, dan PT. YWA.

Roap Map dan SDGs

Diharapkan pada tahun 2020, perusahaan sudah memiliki 13 Asisten yang dapat memberikan Pendampingan Program **DMPA** kepada 49 desa yang berada di seluruh lokasi perkebunan TAP Group.

Dengan adanya program ini, perusahaan berharap agar dapat membantu menciptakan dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi baru bagi desa-desa sekitar perusahaan. Dengan berhasilnya program ini, maka perusahaan juga akan berkontribusi pada program Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang saat ini dicanangkan oleh Pemerintah terutama pada pembangunan desa tertinggal.

Dan pada akhirnya, program **DMPA** ini diharapkan dapat membantu Pemerintah memenuhi beberapa Goals yang tercantum di Agenda SDGs, seperti Tujuan No **1, 2, 3, 8, 10**, dan **17**. Dengan Program ini, TAP Group terbukti mendukung pemerintah Indonesia dalam mempercepat pencapaian SDGs.

Kontributor: Edi Susanto & Widiyanto

DESA YANG DAHULU TERLUPAKAN,

KINI MENUJU KEMAKMURAN

Pada edisi kali ini, kami akan mengulas tentang **Program Pemberdayaan Ekonomi Desa** yang kini sedang dilakukan di PT. GBSM untuk Desa Muara Dua yang terletak di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

KENAPA Desa Muara Dua?

Desa Muara Dua adalah salah satu desa terpencil yang berada di sekitar PT. GBSM di Kalimantan Tengah. Desa yang terletak di Kecamatan Seruyan Hilir ini, beberapa tahun yang lalu hanya memiliki akses transportasi yang terbatas. Letak desa ini sangat terpencil, bagaikan terisolir dari dunia luar. Masyarakat setempat hanya dapat menggunakan Klotok atau perahu kayu sebagai alat transportasi di Sungai Seruyan, dahulu dikenal dengan nama Sungai Seroejan, ke desa tetangga atau ke ibukota kecamatan. Akhirnya di tahun 2014, masyarakat desa memiliki akses jalan darat ketika PT. GBSM membangun jalan di sekitar desa.

Jumlah penduduk desa Muara Dua tidak banyak, desa ini hanya memiliki 145 Kepala Keluarga atau hanya 545 jiwa saja. Masyarakat desa ini memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan ikan tawar, peternak sapi, dan berkebun kelapa sawit.

PT. GBSM melihat ada banyak potensi yang dapat digali di desa ini. Oleh karena itu, perusahaan telah melakukan pemetaan potensi dan merencanakan program Pendampingan Desa. Dengan program ini, perusahaan dapat menguatkan kegiatan ekonomi desa dengan cara mengembangkan sumber-sumber ekonomi dan

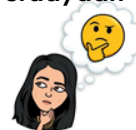


Sarana transportasi Desa Muara Dua sebelum adanya PT. GBSM

memberdayakan BUMDes beserta Unit Usaha dan kelompok-kelompok usaha pendukungnya.

KENAPA Program Pemberdayaan Ekonomi ?

"Berilah kail jangan lkannya"



Mungkin istilah ini sering kita dengar atau kita baca dalam berbagai literatur *Corporate Social Responsibility*. Maksudnya, rancangan program CSR sebaiknya diberikan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat secara mandiri menemukan dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa perlu tergantung pada bantuan dari luar. Sejalan dengan konsep tersebut, upaya pemberdayaan terhadap potensi ekonomi masyarakat lokal harus terus dilakukan dan didampingi. Seperti halnya Kegiatan Pendampingan yang dilakukan di Desa Muara Dua ini.

Setelah perusahaan melakukan *assesment* terhadap potensi ekonomi dan kemampuan masyarakat di Desa

Muara Dua, maka Perusahaan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, salah satunya melalui usaha keramba ikan air tawar.

KENAPA keramba ikan air tawar?

Karena masyarakat desa hidup di pinggir sungai, maka sangatlah mudah memanfaatkan sungai sebagai wadah usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, sesuai dengan karakteristik masyarakat yang tinggal di pinggir sungai dan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki, usaha keramba tentu saja bukan barang baru bagi masyarakat.

Mereka telah memiliki pengalaman yang cukup panjang akan kegiatan budidaya ikan. Namun, usaha ini belum berjalan secara berkelanjutan, karena masyarakat masih kekurangan modal dan pengetahuan dalam budidaya ikan tersebut.



Kondisi Desa Muara Dua



Masyarakat Desa Muara Dua

SUMBER MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA MUARA DUA



Tapi tidak berhenti sampai disitu saja.

Selain perikanan, perusahaan juga akan mengembangkan usaha pertanian sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan desa maupun di luar desa. Saat ini masyarakat desa membeli dari pedagang keliling dengan harga yang cukup mahal karena sayuran berasal dari daerah lain yang jauh, padahal sayuran menjadi komponen penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan generasi muda dan anak-anak karena memiliki vitamin dan gizi yang dibutuhkan. Tentu saja ini menjadi peluang yang besar bagi desa untuk memulai usaha ini.

Potensi selanjutnya yang menjanjikan adalah mengembangkan program pemberdayaan ekonomi di bidang peternakan, yaitu melalui peternakan sapi dan ayam. Ke depannya, diharapkan melalui paket program ekonomi yang diberikan, masyarakat benar-benar dapat memaksimalkan potensi ekonomi yang mereka miliki, baik untuk memenuhi kebutuhan desa sendiri ataupun dapat dikembangkan menjadi bisnis yang dapat dijual ke wilayah yang lain ataupun kepada karyawan perusahaan di sekitar desa.

Oleh karena itu, Program Pemberdayaan Ekonomi ini dapat memenuhi target SDGs terutama No **1, 2, 3, 8, 10, dan 17.**

Kontributor: Edi Susanto
Foto: Edi Susanto
Infografis: M. Hendriansyah

JADI...

Oleh karena itu, kuncinya adalah Pendampingan, ini dilakukan baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah, agar produktivitas dapat meningkat dan berdampak bagi kesejahteraan desa.

KENAPA BUMDes?

Perusahaan yakin bahwa BUMDes ini yang menjadi pondasi yang sangat penting bagi terjaminnya tata kelola bisnis yang akan dijalankan, dimana hal ini sangat berguna untuk memakmurkan desa Muara Dua.

Oke, jadi bagaimana cara kerjanya?

Agar program ini bisa berjalan secara berkelanjutan, pemberian modal dan pelatihan budidaya ikan air tawar dilakukan oleh kelompok unit usaha yang diwadahi melalui BUMDes. Dengan BUMDes, dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan mengalir.

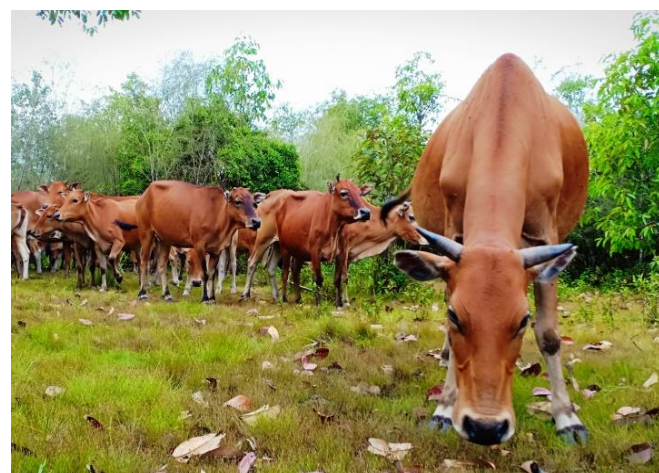
Tata kelola akan sangat baik sehingga pengawasan dari kegiatan ekonomi akan mudah dilakukan. BANK atau BLU juga akan percaya dan memberikan modal untuk pengembangan usaha yang lebih besar.

Kelompok-kelompok unit usaha yang terbentuk akan fokus pada pengembangan usahanya, dengan demikian keuntungan yang didapat selain akan dinikmati oleh anggota juga akan mengalir pada BUMDes. Semua usaha ini diharapkan dapat terus bergulir dan berkembang, membuat desa memiliki pendapatan secara mandiri.

Masyarakat diberdayakan, desa mendapatkan pemasukan, kebutuhan dan pembangunan desa dapat dibantu dari usaha-usaha yang dikembangkan. Secara bertahap taraf hidup masyarakat semakin meningkat dan cita-cita memberikan kesejahteraan secara adil dan merata dapat diwujudkan.



Keramba Ikan Tawar



Penggembalaan Sapi di Desa Muara Dua

WASPADA KARHUTLA AYO KITA CEGAH BERSAMA!

Beberapa tahun terakhir ini, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah menjadi isu yang sangat serius di Indonesia. Lahan gambut yang kering, musim kemarau yang panjang dan ketidakhati-hatian masyarakat dalam membuka lahan merupakan faktor utama terjadinya kebakaran. Asap dari kebakaran hutan juga dapat merugikan kesehatan masyarakat, melumpuhkan perekonomian dan juga mengganggu Negara-negara tetangga.

Oleh karena itu, pemerintah beserta masyarakat dan perusahaan perlu mengambil langkah-langkah konkret agar dapat menanggulangi Karhutla. Hal ini dapat dilakukan dengan seringnya dilakukan sosialisasi kebakaran dini, dan bagaimana cara mengantisipasinya kepada masyarakat setempat dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan.

Keterlibatan seluruh pihak merupakan kunci yang penting dalam mengurangi kebakaran hutan. Semua pihak diharapkan dapat saling mengingatkan dan melakukan sosialisasi ke desa-desa sekitar konsesi agar masyarakat tidak melakukan pembakaran dalam mengolah dan membuka lahan. Selain itu, perlunya juga diberikan pelatihan secara berkesinambungan bagi pihak-pihak terkait dalam hal berkoordinasi jika menemukan titik api (*hotspot*) yang muncul, dan bagaimana mengantisipasi secepat mungkin sebelum kebakaran meluas.



Tempat simulasi Karhutla, PT. GBSM, Kalimantan Tengah

Dengan diadakannya tindakan pencegahan kebakaran seperti ini, kita semua dapat mengurangi kerugian ekonomi. Selain itu, warga setempat juga dapat bebas dari asap kebakaran hutan yang dapat mengganggu kesehatan.

Dengan dilakukan kegiatan sosialisasi ini, TAP Group sudah berkontribusi dalam pencapaian SDGs terutama nomor 13.

Teruskan AKSI MU TAP!

Dokumentasi
Fandy Permana,
Angung Setyawan

"Pencegahan lebih mudah dan murah dibandingkan dengan tindakan pemadaman."

Anonim



Pembukaan Acara Sosialisasi Pencegahan Karhutla serta Pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) oleh Direktur Perlindungan Perkebunan Kementerian Pertanian di PT. NPN



Sosialisasi Karhutla di Desa Jahitan, Seruyan, Kalimantan Tengah bersama Perwakilan Camat Seruyan Hilir, Kapolsek Seruyan Hilir, Danramil Kuala Pembuang, Kepala Desa Jahitan, beserta warga Desa Jahitan dan PT. GBSM

Bencana kebakaran tahun 2015 telah membukakan mata semua pihak. Musibah tersebut adalah sebuah seruan untuk bertindak.

Oleh karena itu, TAP Group mengambil tindakan pencegahan agar tidak terulang kejadian yang dapat merugikan perusahaan, masyarakat maupun Negara. Di tahun 2016, perusahaan beserta seluruh anak perusahaannya secara serentak menginisiasikan program “Desa Bebas Kebakaran” (DBK) sebagai wujud peran serta perusahaan dalam mengatasi bahaya kebakaran di lingkungan sekitar konsesi perusahaan.

Dalam mengantisipasi dan mencegah adanya kebakaran hutan dan lahan, diperlukan keterlibatan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Karena tanpa dukungan dari mereka semua, maka sulit untuk mengurangi angka kebakaran yang terjadi. Oleh karena itu, bersama-sama dengan seluruh pihak terkait, TAP Group membentuk Forum Aksi Bersama di seluruh desa di sekitar konsesi perusahaan.

Melalui program ini, TAP Group memfasilitasi pelaksanaan pelatihan pencegahan kebakaran, melakukan patroli bersama Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) di desa-desa yang berada di konsesi perusahaan, serta memberikan informasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran serta penanganan kebakaran dini.



Simulasi Pemadaman Karhutla di PT. GBSM.

Sejak program ini dimulai, *Alhamdulillah* TAP dapat mempertahankan prestasi bebas kebakaran, yang artinya tidak ada kasus kebakaran di dalam area konsesi hingga saat ini.

Pada laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan dan lahan menurun drastis di tahun 2017 jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan bukti keberhasilan dari upaya pencegahan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sekitar kawasan perkebunan.

Di tahun 2018 ini, agar lebih meningkatkan upaya pencegahan Karhutla, maka TAP Group mengembangkan program DBK dengan menambah langkah-langkah strategis yaitu dengan program “Pencegahan Karhutla BerBasis Klaster”, sesuai dengan yang pemerintah sarankan. Program ini dilakukan melalui program kegiatan, yaitu pencegahan

karhutla yang berbasis kepada Pembinaan Desa yang berada disekitar konsesi, Deteksi Dini, serta Pemadaman Dini. Selain itu, Para pemangku kepentingan yang terdapat di suatu area perkebunan atau perhutanan, diharuskan bekerja sama dalam upaya pencegahan Karhutla.

Program ini diharapkan dapat mendukung dan melengkapi program-program terkait yang sudah dijalankan selama ini, sehingga Indonesia bebas asap akan dapat diwujudkan di tahun 2019 nanti.

Dengan tindakan pencegahan Karhutla ini, maka TAP Group sudah mengambil inisiasi awal untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu Target SDGs No **13** Tentang Perubahan Iklim.

Well Done TAP Group!

Kontributo: Arief Hergunanto & Agung S
Dokumentasi & Infoarafis: Aauna Setyawan

2.611.411 Ha

**Luas Kebakaran Lahan
2015-2017**



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



TAP Group Melakukan Pelatihan Pengelolaan Kebakaran Bersama Mangala Agni di Palangkaraya, Maret 2018

Pangan dan Energi Nasional

Kenapa Sawit Istimewa?

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkebunan kelapa sawit memiliki peran yang penting bagi perekonomian Indonesia, selain menjadi penghasil devisa Negara terbesar, industri sawit juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memiliki peran mengurangi angka kemiskinan.

PERAN KELAPA SAWIT UNTUK INDONESIA



Selain memiliki peran dalam pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan hidup, kelapa sawit juga merupakan komoditas yang sangat istimewa. Ini dikarenakan hasil produk industri kelapa sawit beserta turunannya memiliki fungsi strategis dalam menunjang ketahanan pangan; bahan baku membuat minyak goreng, dan energi, seperti biodiesel. Singkat cerita, sawit adalah produk andalan Indonesia!

Apa yang terjadi pada tahun 2015?

Terjadinya pelemahan ekonomi secara global yang terjadi tahun 2015 telah membuat harga minyak sawit mentah (CPO) turun drastis. Dalam kurun 1,5 tahun, harga CPO tergelincir sebanyak 51% dari posisi tertinggi di tahun 2014 ke posisi terendah di tahun 2015. Hal ini menyebabkan jutaan petani sawit kehilangan pendapatan dan lapangan pencaharian, perusahaan sawit merugi, industri biodiesel tidak dapat berjalan, dan pemerintah semakin berkurang pendapatannya. Selain itu, dengan merosotnya devisa hasil ekspor dan rawannya nilai tukar kurs rupiah, membuat ekonomi Indonesia semakin rapuh.

Oleh karena itu, pemerintah beserta para pemangku kepentingan perlu mengambil suatu tindakan nyata agar dapat menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

Mengapa BPDPKS?

Agar menyelamatkan masa depan industri sawit Indonesia, maka pemerintah bersama para pemangku kepentingan merasa perlu adanya bantuan insentif dari industri ke industri, maka dibentuklah Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang bertugas untuk memungut dan menyalurkan kembali dana sawit. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan demand industri supaya harga sawit stabil dan baik.

Bagaimana caranya?

Dengan menaikkan nilai ekspor minyak sawit ke negara luar dan meningkatkan konsumsi dari negara sendiri, sehingga harga minyak sawit bisa tetap terjaga. Oleh karena itu, dengan menerapkan program wajib biodiesel 20% (Mandatory 20) maka dapat menaikkan konsumsi dalam negeri, berkurangnya impor solar, menaikkan devisa negara dan

pada akhirnya akan menjaga harga sawit nasional. Sehingga mandatori Biodiesel 20 (B20) merupakan kunci untuk dapat menanggulangi krisis yang terjadi pada tahun 2015!

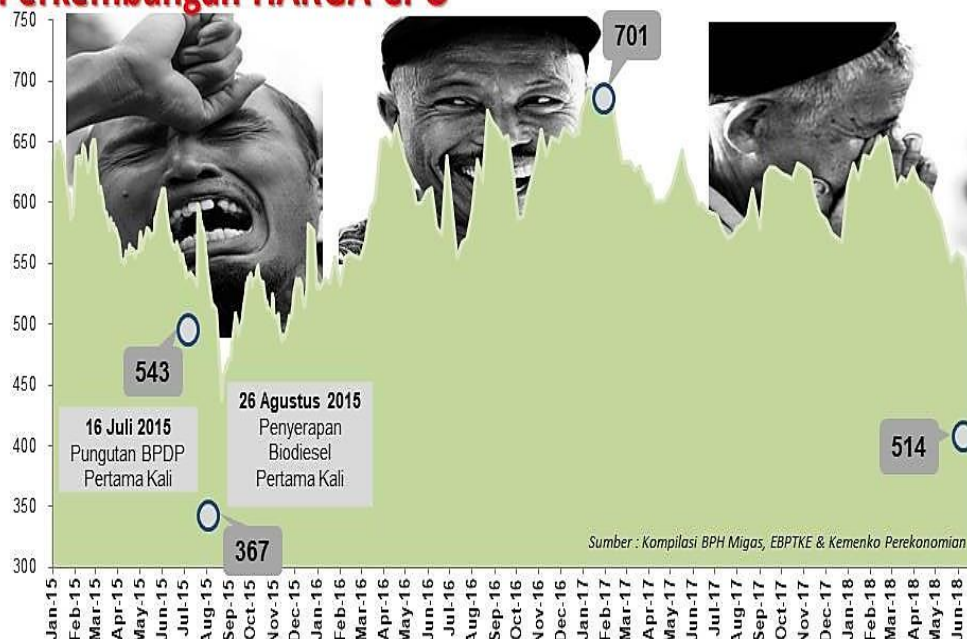
Bagaimana Cara Kerja BPDPKS?

Dari dana yang terkumpul di BPDPKS, salah satunya digunakan untuk pendanaan Biodiesel sebagai bagian dari upaya menambah permintaan domestik. Dana tersebut merupakan insentif dari industri ke industri yang bukan bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Dan memang terbukti program ini membantu peningkatan harga CPO loh! Ini buktinya

Mandatory Biodiesel ini mendorong penyerapan CPO di pasar domestik meningkat drastis. Dengan adanya program B20 ini dapat menompang ketahanan energi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, dengan menurunkan ketergantungan terhadap energi fosil yang berpotensi mengurangi impor hasil minyak solar sebanyak 6.9 juta kilo liter per tahun.

Perkembangan HARGA CPO



NAH, Dimana Peran TAP Group Dalam Program Biodiesel Nasional?

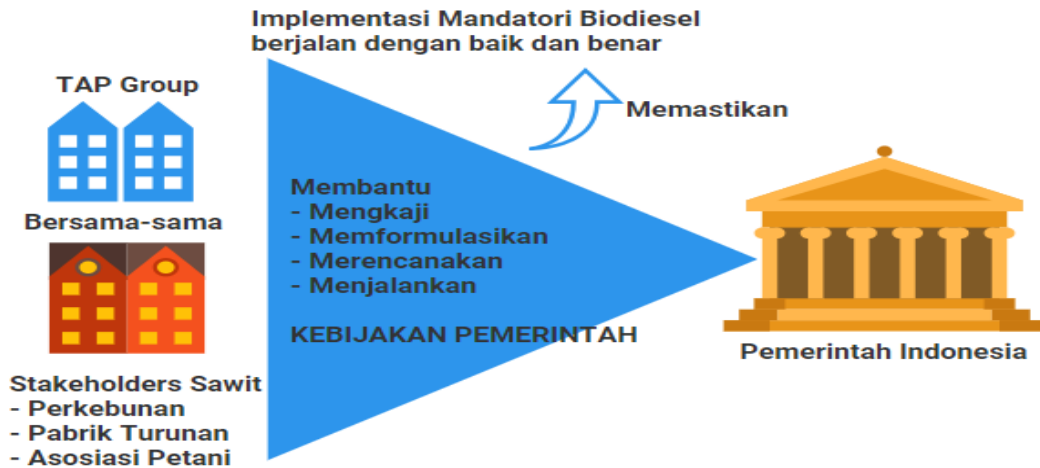
TAP Group memiliki peran aktif dalam memastikan Mandatori Biodiesel ini dapat terlaksana. Ini merupakan langkah penting bagi perusahaan agar memberikan kontribusi langsung kepada kemajuan industri Perkelapasawitan Nasional.

Apabila program Mandatori Biodiesel ini berjalan dengan baik maka kestabilan harga CPO dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Ini akan memungkinkan produk lokal Sawit kita dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi kebutuhan pangan penduduk dunia serta memenuhi kebutuhan energi terbarukan yang lebih ramah bagi lingkungan. Bagi Pemerintah pun, hal ini sangat

penting untuk Penghematan Devisa Negara. Defisit Neraca Perdagangan dapat dikurangi secara signifikan akibat berkurangnya impor minyak yang berlebihan seiring meningkatnya pemakaian produk energi Biodiesel yang merupakan produksi lokal Indonesia.

Dengan hal ini, TAP Group juga memiliki peran dalam membantu pemerintah dalam pencapaian SDGs nomor **7** dan **13** yaitu Energi Terbarukan dan Aksi Iklim.

Penulis: Tim Red



POJOK PINTAR

TAP-LEARN

Di Pojok Pintar ini kami akan memberikan topik-topik yang sering dilewatkan pembaca karena dirasa tidak penting, tapi ini justru penting diketahui dan dapat menambah pengetahuan kita semua.

Tahukah Kamu, sisa hasil proses pengolahan minyak sawit yang dikenal dengan **SOLID** dapat dipergunakan menjadi pupuk loh!

Gak Percaya?

Solid adalah salah satu *by-product* (sisa hasil) pengolahan buah kelapa sawit selain janjang kosong, POME, fiber, cangkang dan abu janjang. Tidak semua pabrik pengolahan buah kelapa sawit dapat menghasilkan Solid karena tergantung proses dan alat yang digunakan. Jika Solid diaplikasikan secara benar dan tepat sasaran maka dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik seperti pupuk Urea, ini dikarenakan Solid mengandung unsur hara Nitrogen.

Seluruh pabrik TAP Group yang menghasilkan Solid, sudah memanfaatkan sisa hasil ini sebagai



tambahan pupuk organik (*fertiliser supplement*).

Dengan mengaplikasikan Solid di lapangan dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan dapat mengurangi biaya penggunaan pupuk konvensional, di sisi lain dengan memanfaatkan Solid sebagai pupuk organik sesuai dengan misi perusahaan "Green Plantation for Better Quality of Life" (Mengembangkan Perkebunan Ramah lingkungan yang Mampu

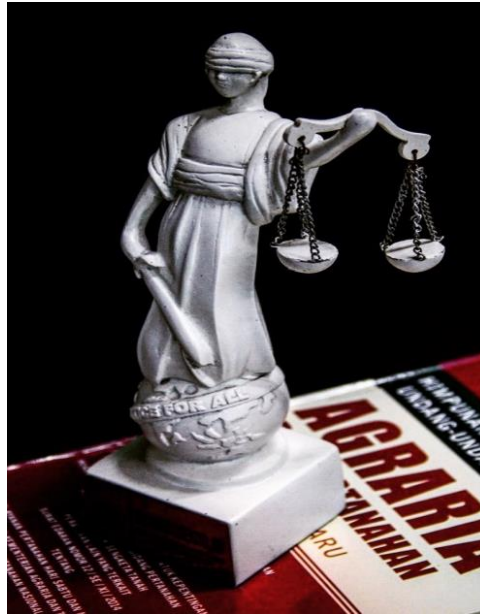
Memperbaiki Taraf Kehidupan Orang Banyak) serta sesuai dengan standarisasi ISPO dan RSPO.

Penggunaan dan pengelolaan secara baik sisa hasil (*by-product*) yang *eco-friendly* ini telah sesuai dengan salah satu Target SDGs nomor **12**, yaitu Pemakaian yang Bertanggung Jawab. Semoga hal kecil ini dapat membawa perusahaan menuju ekonomi dengan sumber daya efisien.

Kontributor Verrie S
Dokumentasi: Kokoh T

Di Pojok Hukum ini kita akan membahas peraturan yang ada dan konsekuensi yang akan dihadapi jika kita lalai dalam melaksanakan kewajiban dari hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Yuk kita simak apa saja peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah beserta hukumannya.

Beberapa tahun ini, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan baru yang berdampak kepada bisnis perkebunan kelapa sawit. Tanggapan perusahaan dalam hal ini sangat jelas, yaitu mendukung dan mematuhi segala ketentuan dan kewajiban sebagai pelaku usaha dan pemegang izin.



Oleh karena itu, kami rasa perlunya mengingatkan hal-hal penting apa saja yang musti kita ketahui dan kerjakan untuk menyelamatkan perusahaan dari dampak *negative* karena banyaknya peraturan yang ada. Jika kita langgar, maka akan berdampak lahan perkebunan perusahaan akan diambil oleh Negara sehingga menyebabkan aset perusahaan berkurang.

Yuk kita lihat dibawah ini, peraturan-peraturan yang sudah ada.

PERPRES 9/2016 ONE MAP POLICY	PERPRES 88/2017 PPTKH	PERPRES 86/2018 REFORMA AGRARIA	INPRES 8/2018 MORATORIUM SAWIT
Perpres untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih peta dan perizinan.	Perpres untuk menyelesaikan permasalahan penguasaan lahan masyarakat dalam Kawasan Hutan	Perpres untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menangani sengketa/ konflik agraria, mempersiapkan TORA, distribusi dan legalisasi	INPRES untuk menunda perizinan baru dan melaksanakan Peraturan Perundangan yang berlaku terkait Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Evaluasi).
↓	↓	↓	↓
PERUNDANGAN	KEWAJIBAN PERUSAHAAN	SANKSI	
UU 5/1960 - UUPA PP 40/1996 - HGU, HGB DAN HAK PAKAI PP 11/2010 - TANAH TERLANTAR PERMEN 5/2015 - IZIN LOKASI PERMEN 7/2017 - HGU	Wajib Laport Realisasi HGU/ Tahun Kewajiban Plasma 20% Area HGU yang dimanfaatkan sesuai Izin	HGU DICABUT HGU DIPOTONG untuk TORA Tanah terlantar/ HGU DIPOTONG untuk TORA	
UU 41/1999 - KEHUTANAN PP 104/2015 - PPFKH PERMEN 51/2016 - PHPK	Pelepasan Kawasan Hutan : 80% untuk Perusahaan, 20% untuk Masyarakat (TORA)	HGU DIPOTONG untuk TORA	
UU 32/2009 - PPLH PP 57/2016 - PPEG PERMEN 14/2017 - FEG	HGU terkena Fungsi Lindung Gambut	HGU DIPOTONG karena fungsi lindung	
UU 39/2014 - PERKEBUNAN PERMEN 98/2013 - IUP	Wajib Laport Realisasi IUP/ 6 bulan Kewajiban Plasma 20%	IUP DICABUT IUP DICABUT	

Jangan lupa, bahwa akan ada sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah jika perusahaan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal penting berikut agar perusahaan tidak melanggar hukum yang sudah diterapkan oleh pemerintah.



Kontributor: Widiyanto

Di TAP-Milestones ini kita menampilkan kejadian penting yang telah perusahaan lakukan dalam mencapai misi perusahaan yaitu *Green Plantation for Better Quality of Life* atau Mengembangkan Perkebunan Ramah lingkungan yang Mampu Memperbaiki Taraf Kehidupan Orang Banyak. Yuk kita lihat pencapaian apa yang telah dilakukan TAP Group di bulan sebelumnya.

Di akhir bulan September lalu, salah satu anak perusahaan TAP Group, PT. Brahma Binabakti (BBB) menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Peremajaan Kelapa Sawit dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Akso Dano di Kantor Bupati Muaro Jambi, Jambi.

Kegiatan ini adalah program Perdana dari Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Mitra Plasma dan Swadaya PT. BBB. Program ini selain menanam kembali kebun kelapa sawit plasma mitra binaan PT. BBB, juga akan menggunakan bibit unggul tersertifikat dan *best practice agronomy*, agar dapat menghasilkan produk minyak kelapa sawit yang bermutu tinggi.

Sebagai tambahan, kegiatan ini merupakan *pilot project* program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat mitra binaan PT. BBB yang **pertamakalinya** dilakukan TAP Group.

PT. BBB juga menjalin kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam hal memberi dukungan pembiayaan program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat KUD Akso Dano.

Dengan adanya program ini, diharapkan



dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para petani plasma yang menjadi binaan PT. BBB.

Acara penandatanganan yang diinisiasi oleh PT. BBB ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat dalam hal ini, **Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Muaro Jambi**.

Hadir dalam acara tersebut adalah Bupati Muaro Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Fadil Arief, Kepala Dinas Perkebunan & Peternakan Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, Camat Sekernan, Kiemas Ismail, Ketua KUD Akso Dano, Amrullah, dan Executive Business Officer BSM, Bagus Hudiono Boesono.

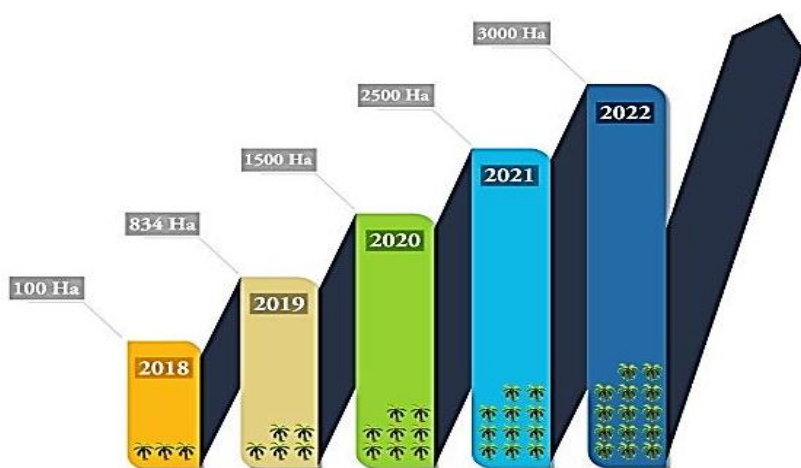
Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, TAP Group sudah memenuhi Goals dari SDGs terutama No **1, 2, 12, 15** dan **17**.

Selamat kepada PT. BBB!

Dokumentasi: Tim PT. BBB
Infografis: M. Hendriansyah



Penandatanganan Perjanjian oleh Direktur Utama PT. BBB, George Oetomo



Road Map Replanting PT. BBB